

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Komisi B Langgengkan Proyek Hotel TIM

JAKARTA - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta yakin revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) akan dilakukan profesional. Walaupun ditentang oleh sejumlah fraksi serta adanya pemangkasan penyertaan modal daerah (PMD).

“Memang akan menghambat. Tapi direksi Jakpro pasti punya rencana setelah pemotongan itu, karena saya kira mereka cukup siap dan profesional untuk itu,” ungkap Abdul Aziz, ketua Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta saat dihubungi INDOPOS, Minggu (8/12/2019).

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mencurigai adanya upaya penyelundupan anggaran. Alhasil, partai banteng moncong putih tersebut menyoro-

rotinya mulai dari proyek adan usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro) hingga Tim Gubernur Percepatan Pembangunan atau TGUPP. Hal tersebut dilayangkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, fraksinya menyoroti keputusan Pemprov DKI Jakarta yang melimpahkan banyak proyek kepada badan usaha PT Jakpro.

Proyek-proyek itu, sambung Jhonny, antara lain memba-

ngun rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp0, Jakarta International Stadium, moda light rail transit (LRT), menyelenggarakan balapan Formula E dan merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta juga mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) yang akan diberikan kepada Jakpro untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020. “Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD,” ungkap dia kepada INDOPOS.

Seperti diketahui, setelah menyumbang Rp200 miliar ke penerimaan asli daerah (PAD) di 2019, PT Jakpro mengusulkan PMD sebesar Rp 600 miliar untuk kegiatan revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Akan tetapi, DPRD DKI Jakarta memangkas PMD yang diajukan Jakpro sebanyak Rp 400 miliar hingga hanya disetujui PMD sebesar Rp 200 miliar dalam KUA-PPAS 2020 karena pembangunan hotel di sana tidak disetujui oleh anggota dewan.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto menyatakan akan tetap revitalisasi TIM dengan angka PMD yang telah disepakati DPRD DKI Jakarta tersebut. Awalnya dalam revitalisasi ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut berencana membangun fasilitas baru seperti hotel, pusat kuliner dan galeri seni yang akhirnya pembangunan hotel tidak disepakati lantaran menjadi polemik.

Akan tetapi, Dwi memastikan dengan PMD yang disepakati, pihaknya akan terus melanjutkan revitalisasi galeri seni dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. “Tahapannya sudah ada, kami akan tuntaskan di 2021,” tukas dia. (aen)



Memang akan menghambat. Tapi direksi Jakpro pasti punya rencana setelah pemotongan itu”.

Abdul Aziz
Ketua Komisi B DPRD
DKI Jakarta